

PERAN *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS* (ICRC) DALAM MENANGANI PANDEMI COVID-19 DI YAMAN

Anjani Pratiwi¹, Asep Kamaluddin Nashir², Andi Kurniawan³

UPN Veteran Jakarta

anjanip@upnvj.ac.id

ABSTRACT

Yemen is a country with a weak health care system, very vulnerable to exposure to the COVID-19 pandemic. Realizing this, assistance from other parties is needed to overcome these problems. The ICRC as an international non-governmental organization (INGO) has an interest in helping deal with the spread of the COVID-19 virus in Yemen. By using the concepts of human security and non-governmental organizations (NGOs), as well as role theory, this study attempts to analyze the ICRC's role in dealing with the COVID-19 pandemic in Yemen. Qualitative-descriptive approach is the method used by the author in this study. Based on the research that has been done, several roles were found by the International Committee of the Red Cross during the handling of the COVID-19 pandemic in Yemen. Firstly, as implementer, the ICRC plays a role in mobilizing resources by providing the goods and services needed during the COVID-19 pandemic in Yemen. Second, as a catalyst, the ICRC plays a role in advocating for the wider community through campaign activities and dissemination of information on the prevention of COVID-19. As a partner, the ICRC is working closely with the Authorities in Yemen, as well as the Yemen Red Crescent and other organizations in dealing with the pandemic. The result of this study indicate that in carrying out its role as an international non-governmental organization, the ICRC has not been able to play its fullest role due to obstacles and challenges in dealing with the COVID-19 pandemic in Yemen.

Keywords: *ICRC, COVID-19, Non-Governmental Organization (NGO), Human Security, Yemen*

ABSTRAK

Yaman merupakan negara dengan sistem perawatan kesehatan yang lemah, sangat rentan untuk terpapar pandemi COVID-19. Menyadari hal tersebut, dibutuhkan suatu bantuan dari pihak lain untuk mengatasi permasalahan tersebut. ICRC sebagai organisasi non-pemerintah Internasional (INGO) berkepentingan dalam membantu menangani penyebaran virus COVID-19 di Yaman.

Dengan menggunakan konsep keamanan manusia dan Non-Governmental Organizations (NGO) serta teori peran, penelitian ini mencoba untuk menganalisis bagaimana peran ICRC dalam menangani Pandemi COVID-19 Di Yaman. Pendekatan kualitatif-deskriptif merupakan metode yang digunakan penulis pada penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa peran yang dilakukan Komite Palang Merah Internasional selama menangani Pandemi COVID-19 Di Yaman. Pertama sebagai pelaksana ICRC berperan dalam memobilisasi sumber daya dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan selama berlangsungnya Pandemi COVID-19 Di Yaman. Kedua sebagai katalisator ICRC berperan dalam melakukan advokasi kepada masyarakat luas melalui kegiatan kampanye dan penyebaran informasi pencegahan COVID-19. Sebagai mitra ICRC bekerja sama dengan Otoritas di Yaman maupun Bulan Sabit Merah Yaman serta organisasi lainnya dalam menangani pandemi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan peranannya sebagai suatu organisasi internasional non-pemerintah ICRC belum dapat berperan secara maksimal dikarenakan adanya hambatan dan tantangan selama menangani Pandemi COVID-19 di Yaman.

Kata kunci: *ICRC, COVID-19, Organisasi Non-Pemerintah (NGO), Keamanan Manusia, Yaman*

PENDAHULUAN

Beberapa pandemi telah dilaporkan sebelumnya dalam sejarah sejak lahirnya umat manusia. Pada dasarnya, Black Death, Flu Spanyol, Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS) dan Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS) telah menjadi pandemi penting yang telah menguji ketahanan manusia. Pandemi ini juga telah berdampak buruk pada semua aspek kehidupan (Gyamfi & et al., 2021). Kini, dunia dihadapkan kembali dengan permasalahan serupa, yakni krisis kesehatan masyarakat terburuk dalam sejarah baru-baru ini, yaitu kemunculan Pandemi COVID-19 yang mempengaruhi

seluruh negara di dunia. Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh novel coronavirus. Virus menyebar terutama melalui tetapan air liur, atau ingus ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin (Mohseni M & et al., 2021). Kemunculan penyakit ini terjadi pertama kali di Wuhan Tiongkok pada bulan Desember 2019, hingga menyebar keseluruh dunia dan dinyatakan sebagai Pandemi global oleh WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) pada 11 Maret 2020. WHO menyatakan Pandemi COVID-19 sebagai pandemi global yang dapat

menjadi ancaman bagi keamanan manusia (Tresea & et al., 2021).

Penyebaran COVID-19 kini menjadi tantangan sekaligus problematika yang harus dihadapi oleh seluruh negara, di mana tidak hanya terkait dengan masalah penularan, akan tetapi juga mengenai dampak yang dihasilkan dari virus ini dalam kehidupan (Juned & Darmastuti, 2020). COVID-19 belakangan ini dikategorikan sebagai suatu ancaman baru yang berpengaruh. Tingginya kasus COVID-19 berdampak pada masalah keamanan manusia antara lain kesehatan, kelaparan, kematian, penurunan ekonomi secara besar-besaran dan meningkatnya kemiskinan (Tresea & et al., 2021). Dikarenakan penyebaran dan tingkat keparahan pandemi COVID-19 sangat tinggi, sistem layanan kesehatan biasanya tidak dapat mengelola dan mengendalikannya sendiri (Mohseni M & et al., 2021). Terlebih saat ini banyak negara menghadapi keadaan darurat atau ketidakstabilan kemanusiaan karena konflik bersenjata dan kekerasan. Negara-negara dengan sistem kesehatan yang lemah kemungkinan akan berada di bawah tekanan yang kuat dan menempatkan ribuan orang yang sudah rentan dalam bahaya yang lebih besar. Salah satu negara dengan sistem kesehatan yang lemah ialah Yaman.

Penting untuk meninjau COVID-19 dalam konteks keseluruhan sistem kesehatan di Yaman, yang sama sekali tidak memadai untuk mengatasi epidemi. Sejak konflik yang terjadi pada 2015, layanan sosial dasar telah mengalami keruntuhan termasuk sistem perawatan kesehatan Yaman. Banyak fasilitas kesehatan telah rusak dan hancur serta petugas layanan kesehatan menderita karena gaji yang tidak konsisten. Kondisi ini berdampak pada ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk penyedia layanan kesehatan semakin berkurang. Saat ini, menurut WHO hanya terdapat sekitar 50% fasilitas kesehatan yang berfungsi penuh, di mana yang tetap buka mengalami kekurangan tenaga kesehatan yang berkualitas, obat-obatan dasar serta peralatan medis seperti masker, sarung tangan dan oksigen. Sekitar 20,1 juta orang diperkirakan membutuhkan bantuan kesehatan (ACAPS, 2022). Fasilitas kesehatan di Yaman tidak siap dan tidak memiliki sumber daya dan kemampuan paling dasar untuk mengatasi wabah COVID-19. Dengan kondisi sistem perawatan kesehatan yang rapuh saat ini, wabah COVID-19 yang meluas di Yaman dapat mengakibatkan konsekuensi yang menghancurkan (Zawiah & et al., 2020). Pakar kesehatan masyarakat telah memperingatkan bahwa pandemi virus

corona akan membahayakan populasi Yaman yang sudah melemah. Banyak pakar kesehatan khawatir Pandemi COVID-19 akan berdampak buruk, karena sekitar 50% populasi Yaman sudah amat membutuhkan layanan kesehatan (Odey, 2022)

Di samping itu, kondisi semakin memprihatinkan di mana pihak-pihak yang bertikai di Yaman telah menghambat dan menghalangi bantuan kemanusiaan. Akibatnya, beberapa organisasi internasional mengumumkan penangguhan bantuan tertentu ke Yaman pada akhir Maret. Amerika Serikat selaku donor terbesar untuk Yaman juga memutuskan untuk memangkas bantuan kemanusiaan pada 27 Maret 2020, termasuk pendanaan yang akan membantu mencegah penyebaran virus corona. Sehari sebelum kasus COVID-19 pertama Yaman diumumkan, Program Pangan Dunia (WFP) juga menyatakan akan mengurangi separuh bantuan ke beberapa bagian Yaman. Bahkan saat COVID-19 melanda negara tersebut, aktor-aktor yang berkepentingan di Yaman telah menghalangi akses bantuan kemanusiaan oleh PBB dan Lembaga bantuan lainnya. Satu laporan menunjukkan bahwa upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan tanggapan akan kebutuhan mendesak lainnya di Yaman telah sangat terhambat oleh pembatasan yang dilakukan

Houthi dan otoritas Yaman lainnya, pada lembaga-lembaga bantuan internasional dan organisasi kemanusiaan. Sejak Mei, Houthi telah memblokir 262 kontainer di Pelabuhan Hodeida milik WHO. Serta memblokir pengiriman besar Alat Pelindung Diri (APD) untuk tanggapan COVID-19. Di sisi lain, Pemerintah Yaman juga telah memberlakukan persyaratan birokrasi yang berat pada lembaga-lembaga bantuan yang secara tidak perlu menunda dan terkadang memblokir bantuan untuk mencapai jutaan penduduk sipil. Pembatasan dan penghambatan akses bantuan kemanusiaan pada masa Pandemi COVID-19 ini, telah menciptakan ancaman keamanan bagi penduduk sipil di Yaman. Hal ini dikarenakan, pembatasan bantuan kemanusiaan mempengaruhi hak individu untuk hidup, serta mempengaruhi standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, dan standar hidup yang layak, termasuk makanan air dan mata pencaharian (Human Rights Watch, 2020).

Oleh sebab itu, diperlukan suatu bantuan mendesak untuk menyikapi masalah ini. Melalui konsep tanggung jawab melindungi oleh PBB dikatakan bahwa apabila negara tidak mampu dan tidak mau melindungi penduduknya, atau negara merupakan sumber ancaman, maka tanggung

jawab beralih ke masyarakat internasional (Simon, 2008). Dikarenakan terdapat keterbatasan yang terkait dengan penanganan wabah COVID-19, diperlukan suatu kerjasama dari berbagai pihak (Bonso & Irwan, 2021). Salah satu diantaranya yaitu *Non-Governmental Organization* (NGO). Organisasi Non-Pemerintah memiliki peluang dan tanggung jawab untuk memainkan peran utama dalam kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan pandemi, khususnya di antara kelompok populasi yang paling rentan (Fadlallah, Daher, & El-Jardali, 2020). ICRC merupakan Organisasi Non-Pemerintah yang berfokus pada wilayah dan komunitas yang paling terkena dampak, ICRC bekerja dengan berfokus pada orang-orang yang rentan dan di tempat-tempat yang tidak dapat diakses oleh orang lain. ICRC bekerja untuk membantu suatu negara menangani permasalahan kemanusiaan di mana negara tersebut sudah tidak mampu menanganinya sendiri (Asnawi, 2017). Dalam situasi Pandemi COVID-19, ICRC berkepentingan untuk memastikan perlindungan kemanusiaan dan memberikan bantuan yang layak bagi masyarakat yang rentan melalui penerapan mekanisme dan kebijakan yang diambil dari prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI). Pandemi COVID-19

menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi kemanusiaan seperti ICRC untuk memastikan perlindungan kemanusiaan kepada orang-orang yang rentan seperti penduduk sipil, orang yang terluka, orang yang terlantar, anak-anak, dan sebagainya. Pada masa Pandemi COVID-19 ini, ICRC meningkatkan responnya terhadap krisis dengan mengintegrasikan COVID-19 sebagai parameter baru yang penting dalam operasinya (Mahmood, 2021). Di mana Yaman merupakan bagian dari operasi terbesar kedua ICRC.

Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengetahui sekaligus menganalisis lebih lanjut mengenai bagaimana keterlibatan ICRC dalam membantu penduduk sipil di Yaman selama Pandemi COVID-19, mengingat beberapa organisasi internasional serta aktor negara mengalami hambatan dalam pemberian bantuan yang pada akhirnya memutuskan untuk menangguk bantuan terhadap Yaman, sementara itu ICRC justru menjadikan wilayah-wilayah yang rentan seperti Yaman sebagai prioritas operasinya. Atas dasar hal tersebut, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana upaya ICRC dalam memberikan bantuan penanganan Pandemi COVID-19 di Yaman.

KAJIAN KONSEPTUAL

Keamanan manusia

Keamanan manusia merupakan konsep yang berkembang dalam kajian keamanan dan menjadi perhatian seluruh dunia. Konsep keamanan manusia menangkap kesadaran yang berkembang bahwa di era globalisasi, keamanan harus meliputi kekhawatiran dan tantangan yang lebih luas daripada sekedar membela negara dari serangan militer eksternal (Acharya, 2014).

Terdapat banyak definisi mengenai keamanan manusia. Laporan Commission on Human Security (CHS) PBB dalam Human Security Now, mendefinisikan keamanan sebagai berikut “...untuk melindungi inti vital dari semua kehidupan manusia, keamanan manusia berarti melindungi kebebasan mendasar- kebebasan yang merupakan inti dari kehidupan. Ini mengandung arti melindungi orang dari ancaman dan situasi kritis dan meluas. Itu berarti menggunakan proses yang dibangun diatas kekuatan dan aspirasi orang, menciptakan sistem politik, sosial, lingkungan, ekonomi, militer dan budaya bersama-sama, memberi orang landasan untuk bertahan hidup, mata pencaharian dan

martabat (Amaritasari, 2022). Laporan ini juga menyatakan bahwa keamanan manusia menyeimbangkan keamanan negara dengan terdiri dari ancaman yang mungkin tidak secara esensial melibatkan keamanan negara, seperti masalah kesehatan dan hak asasi manusia (HAM). Ini mendeskripsikan pendekatan komprehensif untuk keamanan manusia yang memperluas persepsi ancaman dari batas teritorial negara kepada orang-orang yang tinggal di dalamnya. Berdasarkan laporan ini, ancaman keamanan manusia terdiri dari buta huruf, kesehatan yang buruk, kekurangan gizi, dan pencemaran lingkungan (Xiaofeng & Sandano, 2014).

Sementara itu pandangan lain datang dari UNDP, menurut UNDP 1994 keamanan manusia secara luas didefinisikan sebagai keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan represi serta perlindungan dari gangguan tiba-tiba dan berbahaya dalam pola kehidupan rutin, baik itu pada tempat tinggal, di tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat. Human Development Report (HDR) UNDP 1994 mensintesis ancaman terhadap keamanan manusia ke dalam tujuh komponen yaitu keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan individu, keamanan komunitas

dan keamanan politik (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007). Keamanan kesehatan merupakan dimensi penting dari keamanan manusia. Karena kesehatan yang baik berperan penting dalam kelangsungan hidup, penghidupan dan martabat manusia. Kesehatan yang baik dari suatu populasi juga penting untuk kohesi dan stabilitas sosial. Pentingnya kesehatan serta dampaknya bagi keamanan manusia dapat dievaluasi berdasarkan empat kriteria: (1) skala beban penyakit saat ini dan di masa depan; (2) urgensi tindakan; (3) kedalaman dan jangkauan dampak terhadap masyarakat; (4) saling ketergantungan atau eksternalitas yang dapat menimbulkan efek riak di luar penyakit, orang atau lokasi tertentu. Dengan menerapkan empat kriteria tersebut terhadap keamanan kesehatan, tiga ancaman utama terhadap keamanan manusia diidentifikasi: penyakit menular global, ancaman terkait kemiskinan, serta kekerasan dan krisis seperti konflik dan bencana alam (Martin, n.d.). Terkait dengan masalah keamanan kesehatan, pandemi menjadi tantangan keamanan manusia karena kemampuannya untuk menyebabkan gangguan yang tiba-tiba dan berbahaya dalam pola kehidupan sehari-hari. Dikatakan bahwa ancaman terhadap keamanan manusia dari pandemi jauh lebih

merusak daripada banyak ancaman non-tradisional lainnya (Huang, 2015).

Pandemi COVID-19 merupakan suatu bentuk wabah penyakit baru yang dapat menjadi ancaman keamanan manusia, khususnya dapat mengancam keamanan kesehatan. Oleh karena itu konsep keamanan manusia dianggap relevan bagi penulis untuk menjelaskan lebih jauh mengenai situasi COVID-19 di Yaman yang dapat memberikan ancaman kesehatan bagi penduduk sipil serta bagaimana peran ICRC dalam menangani Pandemi COVID-19 di Yaman.

Non-Governmental Organization (NGO)

Tidak ada definisi umum mengenai NGO, namun secara sederhana organisasi non-pemerintah dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang didirikan oleh individu ataupun kelompok dengan tanpa bertujuan mendapatkan keuntungan (*non-profit*) dari kegiatannya. NGO bersifat sukarela dalam membantu memberikan pelayanan kepada khalayak umum. Anna C. Wakil menggambarkan NGO sebagai organisasi swakelola, swasta dan nirlaba yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi orang-orang yang kurang beruntung. NGO yang berdimensi internasional disebut juga INGO (*International Non-Governmental*

Organizations). INGO aktif setidaknya di tiga negara, dengan konstitusi yang memungkinkan untuk dilakukan pemilihan berkala dari badan pemerintahan dan tidak berusaha untuk mendistribusikan keuntungan diantara para anggotanya. Terdapat setidaknya tujuh aspek indikator kelayakan organisasi dalam kategori INGO, diantaranya yaitu tujuan, keanggotaan, struktur, pejabat, keuangan, hubungan dengan organisasi, dan aktivitas lainnya (Amici & Cepiku, 2020).

Terkait dengan peran NGO, David Lewis dan Nazneen Kanji mengungkapkan terdapat tiga peran utama yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah yaitu pelaksana, katalis dan mitra. Peran pelaksana berhubungan dengan mobilisasi sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang membutuhkan. Peran pemberian layanan ini mewujudkan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh NGO diberbagai bidang seperti kesehatan, keuangan mikro, penyuluhan pertanian, bantuan darurat dan hak asasi manusia. Kemudian terdapat peran katalis. Peran katalisator dapat diterjemahkan sebagai kapabilitas NGO untuk menginspirasi, memfasilitasi, atau memberikan kontribusi pada pemikiran dan tindakan yang lebih baik untuk mempromosikan perubahan. Hal ini dapat ditujukan kepada individu maupun

kelompok dalam komunitas lokal ataupun diantara aktor lain dalam pembangunan seperti pemerintah, bisnis serta donor. Hal ini mungkin termasuk pengorganisasian akar rumput dan pembentukan kelompok, pekerjaan gender dan pemberdayaan, pekerjaan lobi dan advokasi, melakukan serta menyebarkan penelitian, dan upaya untuk mempengaruhi proses kebijakan yang lebih luas melalui inovasi dan kewirausahaan. Terakhir yaitu peran mitra. Peran mitra menggambarkan tren yang berkembang bagi NGO untuk bekerja dengan pemerintah, donor dan sektor swasta dalam kegiatan bersama, seperti memberikan masukan spesifik dalam program atau proyek multi-lembaga yang lebih luas. Tidak hanya itu, ini juga meliputi aktivitas yang terjadi diantara NGO dengan masyarakat seperti pekerjaan peningkatan kapasitas yang mempunyai tujuan untuk memperkuat dan mengembangkan kemampuan. Kemitraan tersendiri menimbulkan tantangan penting bagi NGO untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan, efektif, responsive serta tidak tergantung (Lewis & Kanji, 2009)

Peran

Peran dapat dimaknai sebagai seperangkat tingkatan yang diharapkan dari orang-orang dalam posisi tertentu dalam masyarakat. Pada saat yang sama, peran

dipahami sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memegang jabatan. Mochtar Mas'ood menjabarkan peranan sebagai suatu tindakan yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Melalui peranan tersebut, orang yang melakukan peran baik individu maupun organisasi dapat bertingkah laku sesuai dengan harapan lingkungan maupun orang lain (Perwita & Yani, 2005)

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menelusuri dan memahami makna individu atau kelompok dalam konteks isu sosial (Creswell, 2014). Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penggunaan metode penelitian kualitatif-deskriptif ini dimaksudkan penulis untuk memahami fenomena secara lebih mendalam, supaya dapat mendeskripsikan secara rinci situasi dan kondisi Yaman selama pandemi COVID-19, dan bagaimana peran ICRC dalam menangani pandemi COVID-19 di Yaman.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara oleh ICRC Yaman dan ICRC Indonesia, serta dari website ICRC. Selain itu penulis juga menggunakan data

sekunder yang berasal dari buku, jurnal, maupun berita. Penggunaan data dari berbagai sumber ini memungkinkan penulis memperoleh gambaran yang luas mengenai peran ICRC dalam menangani pandemi COVID-19 di Yaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tantangan langsung terhadap ketahanan kesehatan adalah potensi pandemi penyakit menular yang muncul kembali. Pandemi dapat menyebar dengan sangat cepat dan sulit dihentikan, menciptakan tekanan yang tidak dapat diprediksi pada sistem kesehatan masyarakat. Masalah seperti kurangnya akses ke obat-obatan esensial, memperburuk tekanan pada sistem kesehatan selama terjadinya wabah dan menyoroti kekurangan sistem kesehatan dasar seperti infrastruktur kesehatan yang buruk, kurangnya bantuan teknis dan bahkan kualitas obat-obatan dipertanyakan (Anthony & Amul, 2015). Padahal Jaminan hak atas kesehatan (dan akses ke layanan kesehatan selama pandemi seperti COVID-19 ini sangat penting dalam hal ini (Van Hout a & Wells, 2021).

COVID-19 telah menghadirkan banyak tantangan baru dan kompleks bagi sektor kemanusiaan. Pembatasan pergerakan dan barang, penangguhan kegiatan lapangan

tertentu, penutupan perbatasan, dan kurangnya peralatan pelindung untuk staf dan sukarelawan adalah beberapa faktor yang dramatis berdampak pada bantuan kemanusiaan. Sistem kesehatan di tempat-tempat seperti Yaman sama sekali tidak siap untuk menangani kasus COVID-19 tanpa lonjakan dukungan yang besar (ICRC, 2020). Di Yaman, sebagian besar penduduk tidak mempunyai akses ke perawatan kesehatan karena rusaknya fasilitas kesehatan di daerah mereka atau karena kurangnya sumber daya keuangan. Setiap krisis kesehatan baru menambah tekanan lebih lanjut pada fasilitas kesehatan yang sudah kewalahan dan kekurangan kapasitas (ICRC, 2021).

Perawatan kesehatan di seluruh negeri sangat terpukul oleh konflik yang berlarut-larut dan saat ini semakin tegang di wilayah Ma'reb dan Hodeida. Banyak rumah sakit dan pusat kesehatan kekurangan staf, obat-obatan dan persediaan lainnya, membuat mereka tidak mampu menangani kebutuhan perawatan kesehatan dasar. Dan tentu saja, isu utama yang dihadapi semua orang, termasuk di zona konflik adalah COVID-19. Tetapi sejauh ini hanya sebagian kecil vaksin yang mencapai daerah yang terkena dampak konflik. Tingkat vaksinasi di Yaman sangat rendah sekitar 2% orang telah menerima setidaknya satu dosis (ICRC,

2021) Padahal vaksinasi puluhan juta orang yang tinggal di zona konflik dan daerah yang sulit dijangkau lainnya adalah kebutuhan mutlak apabila ingin menyelesaikan pandemi COVID-19. ICRC memperkirakan bahwa lebih dari 100 juta orang sekarang tinggal di daerah dibawah kendali penuh ataupun cair kelompok bersenjata non-negara, seringkali meninggalkan masyarakat di luar jangkauan kampanye vaksinasi yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan (ICRC, 2021).

Sementara itu dalam situasi yang memprihatinkan, pada Mei 2020, pekerja bantuan dan jurnalis melaporkan bahwa baik pemerintah maupun Houthi telah membatasi operasi kemanusiaan di sekitar Marib dan kegubernuran yang lebih luas, sehingga semakin membebani infrastruktur dan mekanisme penanggulangan di kegubernuran itu sendiri. Sejalan dengan kemajuan Houthi, pemerintah dan sejumlah donor internasional melanjutkan pembekuan pemberian bantuan (PeaceRep, 2020). Padahal selama berlangsungnya pandemi COVID-19, pihak berwenang berkewajiban untuk mengizinkan dan memfasilitasi adanya akses bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil yang membutuhkan (Permanasari, 2020). Maka dari itu, organisasi kemanusiaan yang tidak memihak seperti ICRC mempunyai hak untuk menawarkan layanan mereka. Setelah

skema bantuan telah disetujui oleh pihak-pihak terkait, maka negara harus mengizinkan dan memfasilitasi perjalanan bantuan kemanusiaan yang cepat dan tanpa hambatan dengan tunduk pada hak kontrol mereka (misalnya dengan menyesuaikan pembatasan pergerakan terkait pandemi untuk memungkinkan korban mengakses barang dan jasa kemanusiaan). Krisis COVID-19 saat ini membutuhkan mobilisasi sumber daya yang signifikan. Oleh karena itu, negara maupun organisasi internasional harus memberlakukan langkah-langkah mitigasi yang efektif agar tidak berdampak buruk pada respons kemanusiaan utama terhadap COVID-19 (Droege, 2020).

Pada situasi pandemi COVID-19, ICRC sebagai organisasi kemanusiaan mengoptimalkan responnya terhadap krisis dengan menjadikan COVID-19 sebagai tolak ukur penting dalam operasinya. Dalam hal ini, ICRC mengadaptasi programnya untuk mengatasi kebutuhan dan tantangan yang muncul dari pandemi dengan berfokus pada lima inti tanggapan yakni ICRC akan mengadaptasi program yang telah ada, dan berfokus pada hal-hal di mana ICRC memiliki peranan dan value yang lebih besar, ICRC juga memberikan tanggapan melalui dukungannya terhadap Perhimpunan Nasional dan Koordinasi dalam Gerakan,

juga memberikan saran serta berdialog dengan pihak berwenang, terkahir ini tanggapan penting lainnya yaitu mendukung sistem dan infrastruktur. Melalui delegasinya, ICRC telah menetapkan respon sementara terhadap COVID-19 berdasarkan kebutuhan yang ada dan yang diantisipasi dalam konteksnya masing-masing. Dalam situasi pandemi saat ini, ICRC memiliki prioritas operasional utama antara lain mendukung infrastruktur kesehatan vital, mencegah penyebaran penyakit di tempat-tempat penahanan, memastikan akses masyarakat terhadap air bersih serta memperkuat praktik kebersihan yang baik. Selain itu, ICRC juga bekerja dengan mitra Gerakan untuk berkontribusi pada tanggapan global dan lokal terhadap krisis yang terjadi. Prioritas penting lainnya juga memastikan perlindungan untuk orang-orang yang rentan dan melakukan aksi kemanusiaan, serta mempertahankan kegiatan yang mempromosikan ketahanan masyarakat (ICRC, 2020).

Dalam menangani Pandemi COVID-19 di Yaman, ICRC sebagai organisasi non-pemerintah menjalankan peranannya sebagai pelaksana, katalisator maupun mitra. Melalui perannya sebagai pelaksana ICRC berperan dalam memfasilitasi serta menyalurkan bantuan kemanusiaan baik berupa barang dan

jasa yang dibutuhkan untuk menangani Pandemi COVID-19. Kegiatan bantuan kemanusiaan ICRC terutama di bidang kesehatan merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan pada masa pandemi COVID-19 (ICRC, 2012) ICRC berupaya untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang paling mendesak di Yaman dengan memberikan dukungan material dan bantuan di tempat yang memungkinkan rumah sakit untuk mengatasi kekurangan pasokan dan masuknya pasien yang diperparah oleh pandemi. Selama pandemi, ICRC menyumbangkan persediaan darurat, termasuk barang-barang penting untuk mencegah penyakit, kepada penyedia layanan dan fasilitas berbasis masyarakat. ICRC berperan dalam menerbangkan beberapa ton pasokan dan peralatan medis untuk digunakan di pusat perawatan kesehatan di Aden (ICRC, 2020). Disamping itu, ICRC telah memainkan peran penting dalam memastikan petugas medis, petugas kesehatan, dan sukarelawan dilengkapi dengan aman untuk menghadapi krisis, menyiapkan perlengkapan medis, APD seperti pelindung wajah, sarung tangan, baju pelindung dan termometer. Beberapa tindakan pencegahan seperti jarak sosial dan sering mencuci tangan di kamp pengungsian atau tempat penahanan juga dilakukan untuk

menghindari tempat-tempat tersebut menjadi area pandemi. Di tempat-tempat penahanan seperti penjara, ICRC membuat rekomendasi untuk pengelolaan penjara beserta langkah-langkah untuk memerangi COVID-19. ICRC juga memberikan dukungan yang komprehensif terhadap respon COVID-19 pada situs karantina dan fasilitas isolasi, diantaranya melalui pendistribusian perlengkapan kebersihan, bahan pembersih, barang-barang rumah tangga (misalnya kasur dan selimut), perbekalan kesehatan dan peralatan yang diperlukan (misalnya genset, alat pelindung diri (APD), tenda) (ICRC, 2020).

Selain itu ICRC juga berperan dalam melakukan restorasi dan memelihara infrastruktur infrastruktur penting. Mendukung infrastruktur kesehatan vital merupakan salah satu prioritas operasional utama yang dilakukan oleh ICRC. Pada saat wabah COVID-19 mengancam untuk membebani sistem perawatan kesehatan yang lemah seperti di negara-negara yang terkena dampak konflik dan kekerasan lainnya, ICRC meningkatkan bantuan teknis, keuangan, dan materialnya ke rumah sakit, klinik dan layanan medis lainnya yang didukungnya di seluruh dunia. ICRC secara teratur mendukung fasilitas perawatan kesehatan di daerah rawan dengan dukungan materi,

keuangan, dan peningkatan kapasitas serta dengan bantuan teknis untuk menetapkan protokol medis standar dan langkah-langkah pengendalian infeksi. Kegiatannya juga meliputi perbaikan infrastruktur untuk memperluas kapasitas rumah sakit, memastikan pasokan air yang stabil, dan pengelolaan limbah yang tepat, serta meningkatkan pemberian layanan secara keseluruhan. Restorasi dan pemeliharaan infrastruktur penting memberikan manfaat bagi jutaan orang di Yaman. ICRC mengadopsi langkah-langkah melawan penyebaran virus COVID-19 dalam aktivitasnya dan memperkuat dukungannya untuk fasilitas vital seperti rumah sakit, pusat kesehatan, tempat karantina dan fasilitas isolasi (ICRC, 2020).

Kemudian dalam perannya sebagai katalisator, ICRC berperan dalam membantu mencegah penyebaran pandemi melalui advokasi tentang pencegahan penularan Pandemi COVID-19. Selama berlangsungnya pandemi, ICRC membantu memberikan informasi terkait pencegahan COVID-19 dengan tujuan untuk menekan penyebaran penyakit. ICRC melakukan kampanye informasi, termasuk rekaman audio dengan langkah-langkah pencegahan COVID-19 praktis dan kesadaran masyarakat (ICRC, 2020). Hal ini juga dilakukan ICRC

untuk mengurangi adanya stigma, rumor maupun misinformasi terkait dengan COVID-19.

Sebagai organisasi internasional non-pemerintah, selama pandemi ICRC berperan dalam memberikan pelatihan kepada kurang lebih 100 orang Yaman yang dipekerjakan secara lokal serta 20 staf internasional, untuk mengendalikan pasien COVID-19, dan memberikan dukungan kesehatan mental dan psikososial kepada pasien, keluarga pasien serta petugas kesehatan lainnya. Di samping itu, ICRC juga turut memberikan pelatihan dan dukungan finansial dan teknis kepada Perhimpunan Nasional dalam rangka mengembangkan kemampuannya untuk menggambarkan dan mempublikasikan karya gerakan secara akurat, dan untuk mengumpulkan dukungan untuk kegiatannya (ICRC, 2020).

Selain kegiatan pelatihan, ICRC juga turut melakukan kegiatan pemberdayaan dengan mengadakan sesi pelatihan mengenai kebersihan yang layak, termasuk di pusat-pusat penahanan. Staf kesehatan ICRC juga telah melakukan sesi kesadaran mengenai tindakan pencegahan COVID-19 di dalam 51 tempat penahanan. Pekerja penjara dan para tahanan menghadiri sesi ini. Otoritas dan personel penjara, serta tahanan diberikan

edukasi mengenai bagaimana menahan penyebaran penyakit menular melalui sesi peningkatan kesadaran oleh ICRC ini. Staf kesehatan ICRC juga mengadakan enam lokakarya dengan tim manajemen fasilitas kesehatan pendukungnya di Sana'a dan Provinsi Al-Bayda terkait cara penggunaan APD, cara penanganan kasus yang dicurigai, serta cara mendisinfeksi fasilitas kesehatan (ICRC, 2020).

Tidak hanya itu, selama pandemi COVID-19 ICRC berupaya untuk menumbuhkan rasa hormat terhadap Hukum Humaniter Internasional dan tindakan kemanusiaan di antara semua pihak yang berkonflik, dengan cara mengingatkan mereka baik melalui dialog, representasi tertulis, ataupun pernyataan publik tentang kewajiban mereka untuk tidak menyakiti warga sipil, mencegah penggunaan infrastruktur penting sebagai objek militer dan mengizinkan akses ke layanan penting. ICRC juga berusaha untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil untuk mengatasi COVID-19 tidak berdampak buruk pada kelompok rentan atau aksi kemanusiaan (ICRC, 2020).

Terakhir sebagai mitra, ICRC berperan dalam melakukan kerjasama baik dengan Pemerintah Yaman, mitra Gerakan

seperti Bulan Sabit Merah Yaman, maupun organisasi lainnya. ICRC berperan dalam mendukung pemerintah ataupun YRCS dalam menangani Pandemi COVID-19 di tempat-tempat karantina, pusat isolasi maupun di penjara. ICRC juga bekerja sama dengan Lembaga-lembaga lainnya, seperti IFRC dan WHO serta IASC dengan memberikan masukan spesifik dalam program maupun proyek multi-lembaga yang lebih luas. ICRC bersama dengan lembaga lainnya memberikan rekomendasi terkait dengan panduan dan tindakan terkait COVID-19 seperti mengeluarkan catatan bersama yakni menerbitkan Joint Note yang menguraikan tindakan khusus untuk dipertimbangkan di tingkat operasional guna memastikan penyediaan vaksin COVID-19 dilingkungan yang rentan, terpengaruh konflik, tidak terhalang oleh tindakan kekerasan atau pembatasan. (WHO, 2021) Serta mengembangkan Panduan Sementara Tindakan Kesehatan Masyarakat dan Sosial untuk COVID-19 terkait operasi kesiapsiagaan dan respon dalam kapasitas rendah dan pengaturan kemanusiaan guna mencegah meluasnya penyebaran pandemi COVID-19 (IASC, 2020).

Walaupun demikian terdapat hambatan dan tantangan bagi ICRC dalam menangani pandemi COVID-19 di Yaman.

ICRC memiliki hambatan di mana respon ganda ICRC terhadap konflik dan COVID-19 menjadi lebih sulit karena langkah-langkah vital yang diambil untuk menahan pandemi. Di samping itu, terdapat pembatasan dan pencegahan dalam perjalanan pengumpulan bantuan kemanusiaan dan pada akhirnya menghalangi Tim ICRC memasuki negara atau mengirim pasokan (Maurer, 2020) ICRC mengalami kesulitan untuk menemukan akses ke orang-orang yang membutuhkan karena perang masih berlangsung bahkan ditengah kemunculan pandemi (Guoxiu, 2020).

Tantangan besar lainnya bagi ICRC dalam menangani COVID-19 di Yaman adalah penyebaran misinformasi, disinformasi, rumor dan teori konspirasi tentang COVID-19. Misinformasi dan disinformasi seperti itu sering menenggelamkan komunikasi kesehatan masyarakat resmi oleh otoritas kesehatan tentang COVID-19. Iklim ketidakpercayaan dan informasi yang salah ini mendorong stigma dan kekerasan terhadap dokter, perawat, pasien, rumah sakit, dan ambulans. Salah satu petugas profesional medis ICRC di Yaman mengatakan bahwa dia diperlakukan lebih seperti kasus COVID-19 daripada dokter COVID-19. Selain itu, beberapa komunitas dengan keras menentang

pendirian pusat karantina, sementara di komunitas lain, suku dan keluarga menggunakan kekerasan untuk menolak kerabat dipindahkan ke karantina atau ketika staf layanan kesehatan tidak dapat menyelamatkan pasien dengan COVID-19. Terakhir, ketika pasien meninggal karena virus, pembatasan yang di berlakukan pada pemakaman, upacara adat, dan adat istiadat karena masalah kesehatan masyarakat juga berulang kali memicu kekerasan (Mahdawi, 2023).

SIMPULAN

Yaman merupakan salah satu negara di dunia yang rentan apabila terpapar pandemi COVID-19. Dengan sistem perawatan kesehatan yang lemah, di mana hanya 50% yang berfungsi penuh, serta dengan kondisi kurangnya obat-obatan, fasilitas medis, peralatan medis, maupun pekerja medis, membuat penduduk sipil di Yaman terancam akan masalah keamanan kesehatan. Sementara itu, ditengah kondisi yang memprihatinkan otoritas-otoritas di Yaman juga melakukan pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan dari negara maupun organisasi internasional termasuk bantuan untuk penanganan COVID-19. Dengan situasi tersebut, masyarakat di Yaman tidak

akan mampu untuk mengatasi wabah COVID-19. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan dari pihak lain dalam menangani masalah Pandemi ini.

ICRC merupakan salah satu organisasi internasional non-pemerintah di bidang kemanusiaan yang berkepentingan dalam memberikan bantuan penanganan pandemi COVID-19 di Yaman, di mana Yaman menjadi wilayah operasional terbesar kedua ICRC. Dalam menangani Pandemi COVID-19 di Yaman, ICRC sebagai organisasi non-pemerintah menjalankan peranannya sebagai pelaksana, katalisator maupun mitra. Melalui perannya sebagai pelaksana ICRC berperan dalam memfasilitasi serta menyalurkan bantuan berupa barang dan jasa yang dibutuhkan untuk menangani Pandemi COVID-19, seperti menyalurkan APD, memberikan obat-obatan, pembersih, maupun memperbaiki rumah sakit. Kemudian dalam perannya sebagai katalisator, ICRC berperan dalam membantu mencegah penyebaran pandemi melalui advokasi tentang pencegahan penularan Pandemi COVID-19. Hal ini juga dilakukan ICRC untuk mengurangi adanya stigma, rumor maupun misinformasi terkait dengan COVID-19. Terakhir sebagai mitra, ICRC berperan dalam melakukan kerjasama baik dengan Pemerintah Yaman, mitra

Gerakan seperti Bulan Sabit Merah Yaman, maupun organisasi lainnya. ICRC berperan dalam mendukung pemerintah ataupun YRCS dalam menangani Pandemi COVID-19 di tempat-tempat karantina, pusat isolasi maupun di penjara.

Meskipun demikian, ICRC belum dapat melakukan secara masif dalam hal penanganan pandemi COVID-19 di Yaman. Kembali lagi dikarenakan permasalahan pembatasan dan penghambatan bantuan kemanusiaan sehingga sulit menemukan akses ke orang-orang yang membutuhkan. Di samping itu, maraknya misinformasi, rumor, teori konspirasi dan stigmatisasi tentang COVID-19 juga turut mempersulit pencegahan dan penanganan COVID-19 di masyarakat Yaman. Selain itu, penutupan pendirian pusat karantina oleh komunitas dan penolakan staf kesehatan untuk menyelamatkan pasien COVID-19 dan keluarga, juga menyulitkan ICRC untuk menangani penyebaran virus COVID-19 di Yaman.

DAFTAR PUSTAKA

*HANDBOOK OF GLOBAL
HEALTH SECURITY.* Routledge.

ACAPS. (2022). *COVID-19: Current situation and reasons for vaccine hesitancy : ACAPS ANALYSIS HUB YEMEN Thematic Report 10 January 2022.* ACAPS.

Acharya, A. (2014). Human Security. In J. Baylis, S. Smith, & P. Owens, *THE GLOBALIZATION OF WORLD POLITICS An introduction to international relations- Sixth edition.* Oxford University Press.

Amaritasari, I. P. (2022). The Study on the Coronavirus Pandemic Using Human Rights and Human Security Approach. *JURNAL HAM Volume 13, Nomor 2.*

Amici, M., & Cepiku, D. (2020). Roles, Types, and Definitions of International organizations. *Performance Management in International Organizations, International Journal of Public Sector Management, 2020.*

Anthony, M. C., & Amul, G. G. (2015). Health and Human Security. In S. Rushton, & J. Youde, *ROUTLEDGE*

Asnawi, M. I. (2017). Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12, Nomor 1, 2017.*

Bonso, H., & Irwan. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanganan Covid-19. *Jurnal Governance and Politics (JGP), Volume 1, Nomor 2 , Tahun 2021 .*

Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches- 4th ed.,* SAGE Publications, Inc.

Droege, C. (2020, April 16). *COVID-19 response in conflict zones hinges on respect for international humanitarian law.* Retrieved from [blogs.icrc.org:
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/04/16/covid-19-response-respect-international-humanitarian-law/](https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/04/16/covid-19-response-respect-international-humanitarian-law/)

Fadlallah, R., Daher, N., & El-Jardali, F. (2020). K2P COVID-19 Rapid Response Series Strengthening the

- Role of Local and International Non-Governmental Organizations in Pandemic Responses. *Knowledge to Policy (K2P) Center*.
- Guoxiu, W. (2020, Juni 13). ICRC: 'unfortunately the COVID pandemic didn't kill war'. Retrieved from cgtn.com: <https://news.cgtn.com/news/2020-06-13/ICRC-unfortunately-the-COVID-pandemic-didn-t-kill-war--RgOmM1HvHy/index.html>
- Gyamfi, S. A., & et al. (2021). A COVID in the wheels of the world: A contemporary history of a pandemic in Africa. *Research in Globalization* 3 (2021).
- Huang, Y. (2015). Pandemics and Human Security. In S. Rushton, & J. Youde, *ROUTLEDGE HANDBOOK OF GLOBAL HEALTH SECURITY*. Routledge.
- Human Rights Watch. (2020, September 14). *Deadly Consequences Obstruction of Aid in Yemen During Covid-19*. Retrieved from hrw.org: <https://www.hrw.org/report/2020/09/14/deadly-consequences/obstruction-aid-yemen-during-covid-19>
- IASC. (2020). *Interim Guidance Public Health and Social Measures for COVID-19 Preparedness and Response Operations in Low Capacity and Humanitarian Settings, Version 1*. Inter-Agency Standing Committee.
- ICRC. (2012). *ASSISTANCE FOR PEOPLE AFFECTED BY ARMED CONFLICT AND OTHER SITUATIONS OF VIOLENCE*. International Committee of the Red Cross.
- ICRC. (2020). *Annual Report 2020 Volume II*. International Committee of the Red Cross.
- ICRC. (2020, Juli 1). *COVID-19: Our response in Yemen*. Retrieved from icrc.org: <https://www.icrc.org/en/document/covid-19-our-response-yemen>
- ICRC. (2020, Mei 10). *Our work in the Middle East: Operational response to COVID-19*. Retrieved from icrc.org: <https://www.icrc.org/de/node/78982>
- ICRC. (2020). *Preliminary Appeal The ICRC'S Operational Response To*

- COVID-19*. International Committee of the Red Cross.
- ICRC. (2020, April 23). *Yemen: Millions prepare for Ramadan amid floods, conflict and coronavirus threat*. Retrieved from icrc.org: <https://www.icrc.org/en/document/yemen-millions-prepare-ramadan-amid-floods-conflict-and-coronavirus-threat>
- ICRC. (2021, Agustus 5). *Health Situation in Yemen*. Retrieved from icrc.org: <https://www.icrc.org/en/document/health-situation-yemen>
- ICRC. (2021, April). ICRC Response To COVID-19 Near and Middle East.
- ICRC. (2021, Desember 2). *ICRC: Omicron highlights need to step up global vaccinations, including in conflict zones*. Retrieved from icrc.org: <https://www.icrc.org/en/document/icrc-omicron-highlights-need-step-global-vaccinations-including-conflict-zones>
- ICRC. (2021, Desember 21). *Middle East in 2021: Despite a year out of the global spotlight, millions remain in need*. Retrieved from icrc.org: <https://www.icrc.org/en/document/middle-east-2021-despite-year-out-global-spotlight-millions-remain-in-need>
- Juned, M., & Darmastuti, S. (2020). Upaya Pemahaman Terhadap Pencegahan Penularan COVID-19 Di Kelompok Serikat Tolong-Menolong Dos Ni Roha, Bulak-Klender. *Resona Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat Volume 4, No. 2*.
- Lewis, D., & Kanji, N. (2009). *Non-Governmental Organizations and Development*. Routledge.
- Mahdawi, D. (2023, Maret 26). ICRC's role in dealing with COVID-19 in Yemen. (A. Pratiwi, Interviewer)
- Mahmood, H. (2021). How the International Humanitarian Laws Play roles in the COVID-19 Pandemic Situation? *Conference: UiTM International Conference on Law & Society 2021 (UiTM i-CLaS 2021) At: Virtual*.
- Martin, M. (n.d.). *Health as human security*. Retrieved from [humansecuritycourse.info: http://humansecuritycourse.info/module-4-human-security-in-diverse-contexts/issue-4-health/](http://humansecuritycourse.info/module-4-human-security-in-diverse-contexts/issue-4-health/)

- Maurer, P. (2020, 3 27). *COVID-19 poses a dramatic threat to life in conflict zones*. Retrieved from weforum.org: <https://www.weforum.org/agenda/2020/03/covid-19-poses-a-dramatic-threat-to-life-in-conflict-zones/>
- Mohseni M, & et al. (2021). Role of Nongovernmental Organizations in Controlling COVID-19. *Disaster Med Public Health Prep* 16:1705.
- Odey, J. (2022). Great Disaster: The Impact of COVID-19 on Yemen. *Liberty University Journal of Statesmanship & Public Policy, Volume 2, Issue 2, Article 7* 2022.
- PeaceRep. (2020, Juli 27). *Yemen's Response to COVID-19: Part I*. Retrieved from peacerep.org: <https://peacerep.org/2020/07/27/yemens-response-to-covid-19-part-i/>
- Permanasari, A. (2020). Perlindungan Penduduk Sipil Di Wilayah Konflik dalam Pandemi COVID-19: Perspektif Hukum Humaniter. *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter & HAM, Vol. 2, No. 1, Nov 2020*.
- Perwita, A. B., & Yani, Y. M. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. PT Remaja Rosdakarya.
- Simon, O. B. (2008). Human Security and the Responsibility to Protect Approach A Solution to Civilian Insecurity in Darfur. *HUMAN SECURITY JOURNAL Volume 7, Summer 2008*.
- Tadjbakhsh, S., & Chenoy, A. M. (2007). *Human Security Concepts and Implications*. Routledge.
- Tresea, & et al. (2021). The Role of NGO in Environmental and Food Crisis in Indonesia During the COVID-19 Pandemic. *Frequency of International Relations, Vol 3 (1)*.
- Van Hout a, M., & Wells, J. (2021). The right to health, public health and COVID-19 : a discourse on the importance of the enforcement of humanitarian and human rights law in conflict settings for the future management of zoonotic pandemic diseases. *Public Health* 192 (2021).
- WHO. (2021, May). *Join Note on Means to Protect Health Care from Acts of Violence in the COVID-19 Vaccination Rollout in Fragile, Conflict-affected and Vulnerable*

Settings. Retrieved from who.int:
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/joint-note-on-means-to-protect-health-care-from-acts-of-violence-in-the-.pdf?sfvrsn=fbee09f5_5&download=true

Xiaofeng, Y., & Sandano, I. A. (2014).
Human Security: A Path to Global
Security. *IOSR Journal of
Humanities and Social Science
(IOSR-JHSS) Volume 19, Issue 5,
Ver. III.*

Zawiah, M., & et al. (2020). Assessment of
Healthcare System Capabilities and
Preparedness in Yemen to Confront
the Novel Coronavirus 2019
(COVID-19) Outbreak: A
Perspective of Healthcare Workers.
*Frontiers in Public Health July
2020, Volume 8, Article 419.*